



Evaluasi Pemenuhan Hak Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dalam Rehabilitasi Sosial di UPT PRSMP Surabaya: Analisis Berbasis Teori Perkembangan Remaja Santrock

Evaluation of the Fulfillment of the Rights of Children in Conflict with the Law (CICL) in Social Rehabilitation at the UPT PRSMP Surabaya: An Analysis Based on Santrock's Adolescent Development Theory

Lynda Yenie Listaunsanti*, Universitas Surabaya, Indonesia

Mary Philia Elisabeth, Universitas Surabaya, Indonesia

ABSTRACT

This study conducts a systematic literature review of seven selected scholarly articles and policy-related documents examining the social rehabilitation of Children in Conflict with the Law (ABH) at UPT PRSMP Surabaya. Framed within the discourse of child rights protection in institutional settings, the study explores the extent to which ABH's fundamental rights have been substantively fulfilled. These rights include access to education, health services, religious practice, recreation, and legal protection. Using Santrock's theory of adolescent development as an analytical lens, the review evaluates whether rehabilitation practices align with adolescents' developmental needs. The findings indicate that rights fulfillment has been pursued through educational programs, spiritual guidance, vocational training, recreational activities, and legal assistance. Nevertheless, the synthesis identifies persistent structural challenges, notably inadequate physical facilities, incomplete legal-administrative processes, and weak inter-agency coordination. By integrating a developmental perspective into the evaluation of social rehabilitation, this study contributes to the literature by demonstrating that effective rights fulfillment extends beyond regulatory compliance to include institutional coherence and developmental sensitivity. The study concludes that while initial efforts toward fulfilling ABH rights are evident, strengthening infrastructure and improving institutional coordination are critical to enhancing the effectiveness and developmental relevance of rehabilitation programs.

ARTICLE HISTORY

Received 13/12/2025

Revised 22/01/2026

Accepted 27/01/2026

Published 04/02/2026

KEYWORDS

Children in conflict with the law; developmental approach; literature review; social rehabilitation; child rights.

*CORRESPONDING AUTHOR

✉ lyndrayeniel1@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.30743/mkd.v10i1.12639>

PENDAHULUAN

Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) merupakan kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan komprehensif sesuai amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam perspektif hukum nasional, negara berkewajiban memastikan setiap tindakan terhadap ABH tetap menjunjung tinggi prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, serta hak untuk tumbuh dan berkembang. Keberadaan lembaga pelayanan sosial menjadi instrumen strategis dalam menjaga terpenuhinya hak-hak dasar ABH selama proses hukum berlangsung (Nazira & Nawangsari, [2022](#)).

Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra (UPT PRSMP) Surabaya merupakan lembaga strategis Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang memiliki mandat memberikan perlindungan, rehabilitasi sosial, dan pendampingan bagi ABH berusia 14–18 tahun yang terlibat perkara pidana atau menghadapi permasalahan sosial serius (Rosa et al., [2023](#)). Sejak diberlakukannya Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), peran UPT PRSMP menguat sebagai institusi rehabilitatif yang menekankan pemulihan dan reintegrasi sosial melalui layanan psikososial,

pendidikan, pembinaan spiritual, dan pendampingan hukum berbasis prinsip *best interest of the child* (Ihsanudin & Miskan, [2024](#)).

Dari perspektif perkembangan psikologis, sebagian besar ABH berada pada fase remaja (*adolescence*), yaitu periode transisi yang ditandai oleh perubahan biologis, kognitif, dan sosial-emosional yang signifikan. Pada fase ini, remaja masih mencari identitas diri, membutuhkan dukungan afektif, serta rentan terhadap konflik internal dan tekanan lingkungan, sehingga berpotensi terlibat dalam perilaku menyimpang ketika dukungan sosial dan pengawasan tidak memadai (Rinaldi et al., [2025](#)).

Dalam teori perkembangan remaja Santrock, masa remaja dipahami sebagai periode berisiko tinggi akibat ketidakseimbangan antara kematangan biologis dengan kematangan kognitif dan emosional. Remaja telah memiliki kemampuan berpikir abstrak, namun fungsi eksekutif seperti kontrol diri dan pengambilan keputusan rasional belum berkembang optimal, sehingga impulsivitas dan respons emosional kerap mendominasi perilaku (Ummairoh et al., [2023](#)). Kerentanan multidimensional ini menegaskan bahwa rehabilitasi sosial bagi ABH tidak dapat dipahami semata sebagai kewajiban hukum, melainkan sebagai intervensi perkembangan yang krusial.

Dalam praktik rehabilitasi di UPT PRSMP Surabaya, pemenuhan hak-hak ABH—seperti pendidikan, kesehatan, pembinaan spiritual, rekreasi, dan perlindungan hukum—telah diupayakan melalui berbagai program layanan. Sebagai ilustrasi, beberapa studi melaporkan bahwa anak yang mengikuti pendidikan nonformal dan pelatihan keterampilan di lembaga rehabilitasi menunjukkan peningkatan regulasi diri dan kesiapan reintegrasi sosial, meskipun capaian tersebut sering terhambat oleh keterbatasan fasilitas dan durasi pendampingan (Sanjaya et al., [2025](#)). Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pemenuhan hak ABH sangat berkaitan dengan kesesuaian layanan terhadap kebutuhan perkembangan remaja.

Sejumlah penelitian terdahulu mengidentifikasi bahwa pemenuhan hak Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di lembaga rehabilitasi sosial masih menghadapi tantangan struktural dan teknis yang signifikan. Berbagai studi menegaskan bahwa keterbatasan infrastruktur, minimnya fasilitas pembelajaran berbasis vokasional maupun akademik, serta ketidaklayakan sarana hunian mengurangi kualitas layanan yang seharusnya diberikan (Fardian & Santoso, [2020](#)). Hambatan administratif, terutama ketidaklengkapan dokumen hukum dari aparat penegak hukum, turut memperlambat proses asesmen psikososial dan penetapan program rehabilitasi, sehingga mengganggu kesinambungan intervensi yang dibutuhkan anak. Permasalahan teknis tersebut menunjukkan belum optimalnya koordinasi antar lembaga dalam sistem peradilan dan perlindungan anak (Putry & Rifa'i, [2023](#)).

Selain kendala internal, berbagai penelitian juga menyoroti hambatan eksternal yang turut memperburuk efektivitas rehabilitasi sosial ABH. Stigma masyarakat terhadap anak yang pernah terlibat kasus hukum sering menjadi penghalang terbesar dalam proses reintegrasi sosial, terutama ketika masyarakat memandang ABH sebagai individu berisiko tinggi dan sulit diperbaiki. Penolakan sekolah dan institusi pendidikan untuk menerima kembali ABH menyebabkan terputusnya hak memperoleh pendidikan formal, sementara lingkungan sosial yang tidak suportif berpotensi memicu *relaps* perilaku menyimpang. Hambatan eksternal ini tidak hanya menghambat pemulihan psikososial anak, tetapi juga mengurangi efektivitas program rehabilitasi yang telah diberikan lembaga (Al-Ghony et al., [2024](#)).

Beragam dinamika tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara mandat normatif lembaga rehabilitasi sosial dengan implementasi kebijakan di lapangan. Meskipun kerangka regulasi telah menetapkan standar layanan yang komprehensif, realitas pelayanan belum sepenuhnya sejalan

dengan prinsip nasional perlindungan anak dan standar rehabilitasi sosial yang ideal. Celah antara regulasi dan praktik ini menegaskan pentingnya kajian yang lebih mendalam untuk mengevaluasi implementasi layanan, mengidentifikasi sumber hambatan secara sistematis, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang relevan dan berbasis bukti untuk memperkuat pemenuhan hak-hak ABH secara berkelanjutan (Inderasari et al., [2022](#)).

Meskipun berbagai kajian telah membahas pemenuhan hak ABH dan tantangan rehabilitasi sosial, sebagian besar penelitian masih bersifat normatif-deskriptif dan belum mengaitkan secara sistematis antara pemenuhan hak anak dengan indikator perkembangan remaja sebagai kerangka evaluatif. Keterbatasan ini menunjukkan adanya celah penelitian dalam mengintegrasikan perspektif hukum dan teori perkembangan remaja, khususnya teori Santrock, untuk menilai sejauh mana layanan rehabilitasi sosial benar-benar mendukung kebutuhan perkembangan ABH.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pemenuhan hak Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dalam rehabilitasi sosial di UPT PRSMP Surabaya menggunakan analisis berbasis teori perkembangan remaja Santrock. Penelitian ini secara khusus menjawab dua pertanyaan: (1) bagaimana implementasi pemenuhan hak ABH di UPT PRSMP Surabaya ditinjau dari regulasi nasional dan kebutuhan perkembangan remaja; dan (2) apa saja hambatan internal dan eksternal yang memengaruhi efektivitas pemenuhannya. Temuan penelitian ini diharapkan memperkuat kontribusi teoritik dan praktis dalam pengembangan kebijakan rehabilitasi sosial ABH di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi dokumen untuk mengevaluasi pemenuhan hak Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dalam layanan rehabilitasi sosial di UPT PRSMP Surabaya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti melakukan penelaahan analitis terhadap dokumen-dokumen ilmiah dan kebijakan yang relevan guna menilai kesesuaian antara kerangka regulatif, praktik kelembagaan, dan kebutuhan perkembangan remaja berdasarkan teori perkembangan remaja Santrock (Rasyid, [2022](#)).

Sumber data penelitian terdiri atas dokumen ilmiah dan kebijakan yang mencakup artikel jurnal terakreditasi nasional dan internasional, buku akademik, laporan penelitian, regulasi pemerintah, serta publikasi resmi kementerian dan lembaga terkait isu Anak Berhadapan dengan Hukum dan rehabilitasi sosial. Dokumen-dokumen tersebut diperoleh melalui penelusuran terbuka terhadap sumber-sumber publikasi resmi dan rujukan akademik yang dapat diakses secara institusional, serta melalui penelusuran rujukan silang (*reference tracing*) dari dokumen utama yang relevan dengan fokus kajian.

Pemilihan dokumen dilakukan melalui tahapan seleksi bertingkat, meliputi: (1) identifikasi awal dokumen berdasarkan kesesuaian topik dan konteks kelembagaan; (2) penilaian substansi dokumen untuk memastikan keterkaitan langsung dengan pemenuhan hak ABH dan rehabilitasi sosial; serta (3) penelaahan menyeluruh terhadap isi dokumen guna menilai kelayakan analitisnya. Berdasarkan proses tersebut, sebanyak tujuh dokumen utama ditetapkan sebagai sumber data yang dianalisis secara mendalam.

Kriteria inklusi mencakup dokumen yang diterbitkan dalam sepuluh tahun terakhir, memiliki relevansi langsung dengan pemenuhan hak ABH, rehabilitasi sosial, implementasi kebijakan perlindungan anak, serta konteks layanan institusional pemerintah (Muhaimin, [2020](#)). Adapun kriteria eksklusi meliputi publikasi non-ilmiah, dokumen yang tidak memuat informasi substantif mengenai praktik rehabilitasi sosial, serta sumber yang tidak mendukung tujuan evaluatif penelitian.

Analisis data dilakukan menggunakan analisis tematik (*thematic analysis*). Proses analisis diawali dengan pembacaan mendalam terhadap seluruh dokumen terpilih untuk memahami konteks dan isi kebijakan serta praktik rehabilitasi sosial. Selanjutnya, dilakukan pengkodean terbuka terhadap unit-unit makna yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak, hambatan internal dan eksternal layanan rehabilitasi, implementasi kebijakan SPPA, serta indikator kebutuhan perkembangan remaja. Kode-kode tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam tema-tema analitis melalui proses kategorisasi dan perbandingan antar-dokumen.

Tahap sintesis dilakukan dengan mengintegrasikan temuan antar-dokumen untuk mengidentifikasi pola implementasi, kesenjangan layanan, serta implikasi teoritik dan praktisnya. Pendekatan analisis tematik dipilih karena mampu menghubungkan dimensi hukum, sosial, dan psikologi perkembangan remaja secara sistematis dalam kerangka evaluasi kebijakan dan praktik rehabilitasi sosial. Tahap akhir analisis diarahkan pada perumusan kesimpulan evaluatif dan rekomendasi berbasis bukti untuk memperkuat efektivitas pemenuhan hak ABH di UPT PRSMP Surabaya (Purwati, [2020](#)).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Pemenuhan Hak Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dalam Rehabilitasi Sosial UPT PRSMP Surabaya

Berbagai temuan hasil sintesis dokumen dan studi terdahulu menunjukkan bahwa implementasi pemenuhan hak Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di UPT PRSMP Surabaya telah dilakukan melalui sejumlah mekanisme pemenuhan hak dasar. Hak pendidikan, misalnya, diwujudkan melalui pemberian akses pendidikan formal yang menegaskan komitmen lembaga terhadap amanat peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak. Pemenuhan hak ibadah juga diimplementasikan melalui kegiatan pembinaan keagamaan seperti salat berjamaah, ceramah agama, serta kegiatan mengaji, yang dalam beberapa laporan penelitian dinilai berkontribusi pada ketenangan emosional dan pembentukan perilaku anak. Selain itu, hak rekreasi dipenuhi melalui berbagai aktivitas seni, musik, olahraga, dan permainan edukatif yang berfungsi sebagai sarana regulasi emosi dan pengurangan tekanan psikologis selama masa rehabilitasi (Meitasari & Kurniawan, [2021](#)).

Sejumlah kajian juga mencatat bahwa pendampingan hukum bagi ABH dilakukan melalui mekanisme pendampingan individual dan *case conference* untuk merumuskan keputusan terbaik bagi anak. Namun, dalam beberapa studi kasus kelembagaan yang dikaji, pendampingan tersebut belum berjalan optimal akibat keterlambatan pengiriman berkas perkara dan ketidaklengkapan administrasi hukum dari aparat penegak hukum, sehingga berdampak pada tertundanya proses asesmen dan penetapan program rehabilitasi. Kondisi serupa juga ditemukan pada layanan kesehatan, di mana meskipun pemeriksaan rutin dan poliklinik internal telah tersedia, keterbatasan fasilitas dan tenaga medis menyebabkan kebutuhan kesehatan tertentu belum tertangani secara optimal (Karmawan et al., [2024](#)).

Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa implementasi pemenuhan hak ABH di UPT PRSMP Surabaya tidak sepenuhnya berjalan linier dengan kerangka normatif regulasi. Keterbatasan fasilitas fisik, minimnya tenaga profesional, kondisi bangunan yang kurang layak, serta lemahnya sistem pengawasan masih menjadi persoalan struktural yang berulang dalam berbagai laporan penelitian. Dalam beberapa kasus, kondisi ini bahkan meningkatkan risiko kaburnya anak atau mengurangi efektivitas intervensi rehabilitatif. Oleh karena itu, meskipun kerangka layanan telah tersedia, efektivitas pemenuhan hak ABH masih sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan dan

koordinasi lintas sektor yang belum sepenuhnya solid. Perihal pemetaan regulasi, teori kebutuhan dasar anak dan implementasinya di UPT PRSMP Surabaya dapat ditunjukkan tabel-tabel berikut ini:

Tabel 1. Pemetaan Regulasi, Hak Anak, dan Implementasi di UPT PRSMP

Regulasi Nasional	Hak Anak yang Diatur	Implementasi di UPT PRSMP
UU No. 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)	Perlindungan hukum, pendam-pingan, <i>due process</i> .	Pendampingan hukum, case conference, koordinasi dengan ABH.
UU No. 35 Tahun 2014 perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	Hak pendidikan, kesehatan, ibadah, rekreasi.	Pendidikan formal, layanan kesehatan dasar, ibadah rutin, kegiatan rekreasi & vokasional.
Permensos No. 26 Tahun 2018 Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi ABH	Tahapan asesmen-intervensi-resosialisasi.	Asesmen awal, pembinaan perilaku, pelatihan keterampilan, bimbingan lanjut.

Sumber: (Rosa, A., [2023](#))

Regulasi nasional sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 1—UU No. 11 Tahun 2012, UU No. 35 Tahun 2014, dan Permensos No. 26 Tahun 2018—menjadi landasan normatif utama dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak ABH. Namun, hasil sintesis literatur menunjukkan adanya ketegangan antara desain normatif regulasi dan realitas implementasi di tingkat lembaga, khususnya dalam hal kesiapan infrastruktur dan kesinambungan koordinasi antar instansi. Dengan demikian, regulasi berfungsi sebagai standar ideal, sementara praktik rehabilitasi menunjukkan variasi capaian yang tidak selalu seragam (Wadjo et al., [2020](#)).

Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa implementasi pemenuhan hak ABH di UPT PRSMP Surabaya tidak sepenuhnya berjalan linier dengan kerangka normatif regulasi. Keterbatasan fasilitas fisik, minimnya tenaga profesional, kondisi bangunan yang kurang layak, serta lemahnya sistem pengawasan masih menjadi persoalan struktural yang berulang dalam berbagai laporan penelitian. Dalam beberapa kasus, kondisi ini bahkan meningkatkan risiko kaburnya anak atau mengurangi efektivitas intervensi rehabilitatif. Oleh karena itu, meskipun kerangka layanan telah tersedia, efektivitas pemenuhan hak ABH masih sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan dan koordinasi lintas sektor yang belum sepenuhnya solid. Kemudian kebaruan pada penelitian ini dalam Upaya pemenuhan hak ABH di UPT PRSMP Surabaya merujuk teori perkembangan Santrock yang dapat diterjemahkan menjadi indikator evaluasi layanan sebagai berikut:

Tabel 2. Pemetaan Kebutuhan Perkembangan Remaja dan Implementasi di UPT PRSMP

Kebutuhan Perkembangan Remaja	Implementasi di UPT PRSMP
Keamanan fisik & perlindungan risiko	Pengawasan, tempat tinggal terlindungi
Stimulasi kognitif & Pendidikan	Pendidikan formal dan pelatihan vokasional
Regulasi emosi & pembinaan moral	Konseling, pembinaan keagamaan
Kebutuhan sosial & hubungan interpersonal	Pembinaan kelompok dan pendampingan
Kegiatan rekreasi & keseimbangan psikologis	Seni, musik, olahraga, aktivitas kreatif

Sumber: Santrock dalam (Wiaro, [2022](#))

Berangkat dari teori perkembangan remaja Santrock, pemenuhan kebutuhan anak mencakup domain biologis, kognitif, dan sosio-emosional. Hasil sintesis dokumen dan kajian terdahulu menunjukkan bahwa sebagian besar layanan rehabilitasi di UPT PRSMP Surabaya telah berupaya mengakomodasi ketiga domain tersebut melalui penyediaan lingkungan aman, pendidikan formal, pelatihan vokasional, serta pembinaan keagamaan dan konseling. Penyediaan layanan ini sejalan dengan prinsip *developmentally appropriate intervention* yang menekankan kesesuaian layanan dengan tahap perkembangan remaja (Nadiah et al., [2021](#)).

Meskipun demikian, beberapa kajian menegaskan bahwa integrasi kebutuhan perkembangan remaja dalam layanan rehabilitasi masih bersifat parsial. Dukungan kesehatan mental yang lebih mendalam, kualitas fasilitas rekreatif, serta kontinuitas pendampingan pasca rehabilitasi sering kali belum menjadi prioritas utama. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak ABH belum sepenuhnya diposisikan sebagai proses perkembangan jangka panjang, melainkan masih dominan sebagai respons institusional terhadap pelanggaran hukum.

Pemenuhan kebutuhan sosio-emosional remaja juga menjadi perhatian melalui berbagai program pembinaan. Kegiatan keagamaan, konseling psikologis, dan bimbingan moral yang disediakan lembaga berfungsi untuk membentuk regulasi diri, ketahanan emosional, serta nilai-nilai positif pada diri remaja, sejalan dengan pandangan Santrock mengenai pentingnya peran dukungan emosional dan spiritual dalam perkembangan karakter. UPT PRSMP Surabaya juga menghadirkan kegiatan rekreatif seperti seni, musik, olahraga, dan aktivitas edukatif yang dirancang untuk membantu remaja menyeimbangkan kondisi psikologis selama menjalani pembinaan. Aktivitas seperti ini tidak hanya menjadi sarana relaksasi, tetapi juga medium untuk memperkuat hubungan interpersonal, meningkatkan rasa kompeten, serta menumbuhkan keterlibatan positif dalam lingkungan sosialnya.

Bentuk pendampingan kelompok yang dilakukan lembaga berperan penting dalam memenuhi kebutuhan keterhubungan sosial remaja yang pada tahap perkembangannya sangat membutuhkan dukungan dari lingkungan sekitar. Melalui pembinaan kelompok dan interaksi yang terstruktur, remaja memiliki ruang untuk mengembangkan identitas sosial yang lebih adaptif serta memperbaiki pola relasi dengan sesama. Meskipun demikian, implementasi layanan di UPT PRSMP Surabaya masih memerlukan penguatan pada beberapa aspek, khususnya terkait dukungan kesehatan mental yang lebih komprehensif dan peningkatan kualitas fasilitas rekreatif. Penguatan ini penting agar keseluruhan layanan yang diberikan dapat sepenuhnya selaras dengan prinsip *developmentally appropriate intervention* sebagaimana ditekankan dalam kerangka teori perkembangan remaja oleh Santrock.

Hambatan Pemenuhan Hak Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di UPT PRSMP Surabaya

Temuan hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa hambatan internal dalam pemenuhan hak ABH terutama berkaitan dengan keterbatasan fasilitas dan sumber daya lembaga. Ketersediaan ruang belajar, sarana olahraga, fasilitas ibadah, ruang konseling, dan fasilitas kesehatan yang belum memadai menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak belum sepenuhnya optimal. Kondisi gedung dan sistem pengawasan yang belum ideal juga dapat memicu risiko keamanan, termasuk potensi tindakan kabur atau kekerasan antar residen. Selain itu, kapasitas SDM yang belum sepenuhnya terlatih dalam pendekatan *trauma-informed care* menjadi tantangan tersendiri. Pendamping, pekerja sosial, maupun instruktur memerlukan keterampilan khusus dalam menangani ABH, terutama dalam aspek perilaku, emosi, dan pemulihan trauma psikologis. Keterbatasan SDM profesional ini menyebabkan layanan belum mampu menjangkau kebutuhan anak secara komprehensif, khususnya pada aspek psikologis dan kesehatan mental (Lutfya et al., 2024).

Sejumlah studi kasus kelembagaan yang dikaji dalam literatur menunjukkan bahwa keterbatasan fasilitas dan SDM sering berdampak langsung pada efektivitas intervensi rehabilitatif. Dalam beberapa laporan, keterbatasan ruang konseling dan minimnya tenaga profesional menyebabkan layanan psikososial bersifat umum dan tidak berkelanjutan, sehingga kebutuhan individual anak tidak sepenuhnya terakomodasi. Temuan ini memperlihatkan bahwa hambatan internal bukan sekadar persoalan teknis, melainkan berimplikasi pada kualitas pemenuhan hak ABH secara substantif.

Hambatan eksternal juga muncul dari faktor sistem dan lingkungan sosial di luar lembaga. Administrasi hukum yang tidak lengkap atau terlambat dari aparat penegak hukum sering menghambat proses rehabilitasi karena anak tidak segera memperoleh status hukum yang jelas. Koordinasi antar lembaga—seperti kepolisian, dinas sosial, sekolah, dan masyarakat—belum berjalan efektif, sehingga berdampak pada kesinambungan layanan. Selain itu, stigma sosial dan penolakan sekolah terhadap ABH memperberat proses reintegrasi sosial, padahal dukungan lingkungan merupakan faktor kunci keberhasilan pembinaan. Jejaring layanan pendukung seperti LSM, sekolah alternatif, lembaga keagamaan, dan komunitas juga masih terbatas, sehingga belum mampu membentuk ekosistem pemulihan yang inklusif bagi ABH. Hambatan-hambatan eksternal ini tidak hanya mengganggu keberlangsungan program, tetapi juga berpotensi memperpanjang dampak psikososial dan hambatan akademik anak (Wahab et al., 2023).

Tabel 3. Hambatan Pemenuhan Hak ABH

Hambatan Internal	Hambatan Eksternal
Fasilitas fisik terbatas (ruang belajar, sarana olahraga, ruang konseling).	Administrasi hukum tidak lengkap dari ABH.
SDM profesional terbatas; belum semua terlatih dalam <i>trauma-informed care</i> .	Koordinasi antar instansi belum efektif.
Gedung dan pengawasan kurang optimal, sehingga meningkatkan risiko anak kabur.	Stigma Masyarakat dan penolakan sekolah.
Sarana kesehatan tidak memadai.	Keterbatasan jejaring pendukung reintegrasi sosial.

Sumber: Santrock dalam (Wiarso, 2022)

Berdasarkan sintesis kritis terhadap temuan literatur, penelitian ini merumuskan sejumlah rekomendasi untuk peningkatan mutu layanan rehabilitasi sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di UPT PRSMP Surabaya. Rekomendasi ini disusun sebagai pendekatan strategis dalam pemenuhan hak ABH pada tahapan asesmen, intervensi, hingga resosialisasi, dengan mengacu pada praktik-praktik yang dinilai efektif dalam berbagai kajian nasional dan internasional.

Pertama, UPT PRSMP Surabaya perlu menerapkan pendekatan *child-centered rehabilitation*, yaitu pendekatan rehabilitasi yang berfokus pada kebutuhan perkembangan anak, keamanan emosional, serta keterlibatan anak dalam pengambilan keputusan. Pendekatan ini dapat dilakukan melalui asesmen berbasis kebutuhan dan faktor risiko individual, konseling psikososial personal, serta penyediaan ruang aman dan fasilitas rekreasi yang sesuai dengan tahap perkembangan. Literatur internasional menunjukkan bahwa model *child-centered rehabilitation* berkontribusi pada peningkatan kepatuhan program, penurunan risiko residivisme, dan percepatan reintegrasi sosial (Alifuddin et al., 2022).

Kedua, kajian ini merekomendasikan penerapan pendekatan *restorative justice* di UPT PRSMP Surabaya melalui penguatan mediasi keluarga dan sekolah, pemberdayaan korban dan pelaku, serta integrasi pembinaan moral dengan pemulihan sosial. Namun, literatur juga mencatat bahwa keberhasilan pendekatan ini sangat bergantung pada kesiapan fasilitator dan dukungan komunitas, sehingga tanpa prasyarat tersebut implementasinya berpotensi bersifat simbolik. Meski demikian, temuan dari Kanada, Selandia Baru, dan Eropa Utara menunjukkan bahwa *restorative justice* lebih efektif dibandingkan pendekatan penghukuman konvensional dalam jangka panjang (Riyadi, 2023).

Ketiga, merespons kuatnya stigma sosial dan keterbatasan pemenuhan hak pendidikan, penelitian ini mengusulkan Strategi Kolaborasi Lokal melalui kemitraan dengan sekolah nonformal, klinik komunitas, psikolog, LSM, dan lembaga keagamaan. Literatur menunjukkan bahwa rehabilitasi berbasis komunitas mampu memperkuat keberlanjutan layanan dan meningkatkan keberhasilan reintegrasi sosial pasca rehabilitasi (Maromi et al., 2024).

Keempat, penguatan kualitas SDM direkomendasikan melalui pendekatan *trauma-informed care* yang mencakup pelatihan berkelanjutan, penyediaan tenaga profesional klinis, serta supervisi kasus. Berbagai kajian internasional menegaskan bahwa pendekatan ini relevan mengingat sebagian besar ABH memiliki riwayat trauma perkembangan, dan implementasinya terbukti meningkatkan regulasi emosi serta kualitas relasi sosial anak (Pasaribu, [2024](#)).

Kelima, penelitian ini merekomendasikan inovasi program berbasis bakat dan resiliensi melalui pengembangan kegiatan seni, musik, olahraga, dan vokasional, asesmen kebutuhan individual, serta mentoring berbasis komunitas. Program yang berorientasi pada minat dan bakat terbukti meningkatkan resiliensi, kontrol diri, *sense of agency*, dan harga diri anak, sehingga mendukung kesiapan mereka dalam proses resosialisasi dan reintegrasi sosial (Magfirah & Razak, [2024](#)).

SIMPULAN

Pemenuhan hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di UPT PRSMP Surabaya menunjukkan bahwa sebagian besar kebutuhan perkembangan anak pada fase *adolescence* telah diakomodasi melalui layanan pendidikan, konseling psikososial, pembinaan spiritual, dan kegiatan rekreasional. Implementasi ini selaras dengan mandat regulatif yang tertuang dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta Peraturan Menteri Sosial tentang Standar Rehabilitasi Sosial Anak, sehingga pelayanan rehabilitasi sosial tidak hanya berorientasi pada pemenuhan hak dasar, tetapi juga mendukung pembentukan identitas, regulasi emosi, dan kesiapan sosial ABH. Namun demikian, pemenuhan hak anak belum sepenuhnya optimal akibat hambatan internal berupa keterbatasan fasilitas fisik, layanan kesehatan, dan kapasitas sumber daya manusia, serta hambatan eksternal seperti lemahnya koordinasi antar lembaga, ketidaklengkapan administrasi hukum, stigma sosial, dan keterbatasan jejaring pendukung reintegrasi.

Kontribusi teoritik utama penelitian ini terletak pada pengembangan indikator evaluasi pemenuhan hak ABH yang diintegrasikan dengan teori perkembangan remaja Santrock. Melalui pemetaan kebutuhan biologis, kognitif, dan sosio-emosional remaja ke dalam indikator layanan rehabilitasi sosial, penelitian ini menawarkan kerangka evaluatif yang melampaui pendekatan normatif berbasis regulasi semata. Kerangka tersebut memungkinkan pemenuhan hak ABH dipahami sebagai intervensi perkembangan yang menentukan efektivitas rehabilitasi dan keberhasilan reintegrasi sosial anak.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena didasarkan pada sintesis sumber sekunder, sehingga tidak melibatkan data empiris lapangan dan berpotensi mengandung *publication bias*. Oleh karena itu, penelitian lanjutan berbasis studi empiris—melalui observasi lapangan, wawancara dengan ABH dan pendamping, serta evaluasi program secara longitudinal—perlu dilakukan untuk menguji dan memperkaya kerangka evaluatif yang dikembangkan. Meskipun demikian, temuan penelitian ini tetap memberikan dasar konseptual dan praktis bagi penguatan rehabilitasi sosial ABH agar berlangsung secara lebih efektif, humanis, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

REFERENSI

- Al-Ghony, M. U., Wijaya, A. U., & Hadi, F. (2024). Restorative Justice dalam Penanganan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum. *Gorontalo Law Review*, 7(1), 85. <https://doi.org/10.32662/golrev.v7i1.3294>
- Alifuddin, M., Suarni, Alhamuddin, A., & Fanani, A. (2022). Religious Education in the Mitigation Space: The Significance of the Muhammadiyah Enlightenment Movement for West Sulawesi Earthquake Survivors. *Jurnal Pendidikan Islam*, 11(1), 61–75. <https://doi.org/10.14421/jpi.2022.11.61-75>

- Fardian, R. T., & Santoso, M. B. (2020). Pemenuhan Hak Anak Yang Berhadapan (Berkonflik) dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 2(1), 7. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v2i1.27043>
- Ihsanudin, H., & Miskan. (2024). Efektivitas Program Pelatihan di UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya. *JISP (Jurnal Inovasi Sektor Publik)*, 3(3), 30–39. <https://doi.org/10.38156/jisp.v3i3.208>
- Inderasari, O. P., Juniarsih, N., Solikaturun, S., & Kusuma, N. (2022). Phenomenological Studies of Children Facing The Law at the Mataram Children's Special Development Institute. *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, 4(1), 40–64. <https://doi.org/10.29303/resiprokal.v4i1.120>
- Karmawan, I. K. J., Surata, I. N., & Sena, I. G. A. W. (2024). Implementasi Pemenuhan Hak-hak Anak Yang Berkonflik dengan Hukum Berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Penyidikan Tindak Pidana Lalu Lintas di Kepolisian Resor Buleleng. *Kertha Widya*, 12(1), 41–62. <https://doi.org/10.37637/kw.v12i1.1955>
- Lutfya, Z., Yulianti, I., & Yarni, L. (2024). Perkembangan Moral Remaja. *Dewantara : Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, 3(3), 108–119. <https://doi.org/10.30640/dewantara.v3i3.2851>
- Magfirah, J., & Razak, A. (2024). The Influence of Resilience on Children's Self-Efficacy in Dealing with the Law at UPTD PPA Makassar City. *Journal of Correctional Issues*, 7(2), 236–245. <https://doi.org/10.52472/jci.v7i2.474>
- Maromi, C., Jannah, M., & Malaikosa, Y. M. L. (2024). Membangun Masa Depan Aman: Strategi Efektif dalam Perlindungan Anak. *Harmoni Pendidikan : Jurnal Ilmu Pendidikan*, 1(3), 141–152. <https://doi.org/10.62383/hardik.v1i3.442>
- Meitasari, A., & Kurniawan, B. (2021). Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Dinas Sosial Kabupaten Lamongan. *Publika*, 59–74. <https://doi.org/10.26740/publika.v10n1.p59-74>
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Perss.
- Nadiah, S., Nadhirah, N. A., & Fahriza, I. (2021). Hubungan Faktor Perkembangan Psikososial dengan Identitas Vokasional pada Remaja Akhir. *QUANTA: Jurnal Kajian Bimbingan Dan Konseling Dalam Pendidikan*, 5(1), 21–29. <https://doi.org/10.22460/q.v5i1p21-29.2172>
- Nazira, F., & Nawangsari, E. R. (2022). Peran Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan Hukum (ABH). *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 251–264. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1775>
- Pasaribu, L. M. (2024). Pendekatan Trauma-Informed dalam Pekerjaan Sosial. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 8(2), 60–71. <https://doi.org/10.22437/jssh.v8i2.38355>
- Purwati, A. (2020). *Metode Penelitian Hukum: Teori dan Praktek*. CV. Jakad Media Publishing.
- Putry, S. D., & Rifa'i, A. (2023). Teknik Komunikasi Pendamping Pembina Anak di LPKS ABH Anak Bangsa. *Jurnal Literasiologi*, 10(2). <https://doi.org/10.47783/literasiologi.v10i2.600>
- Rasyid, F. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Teori, Metode, dan Praktek*. IAIN Kediri Press.
- Rinaldi, R., Ikhsan, E., & Ekaputra, M. (2025). Hak Anak Stateless Person Korban Tindak Pidana Kejahatan Seksual Menurut Hukum Positif di Indonesia. *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 9(1), 356–363. <https://doi.org/10.30743/mkd.v9i1.11218>
- Riyadi, R. (2023). Diversi dalam Kerangka Restorative Justice pada Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum. *Jurnal Syntax Admiration*, 4(9), 894–902. <https://doi.org/10.46799/jsa.v4i9.722>
- Rosa, A., Novaria, R., & Wahyudi, E. (2023). Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Bagi Penerima Manfaat di Unit Pelaksanaan Teknis Marsudi Putra Surabaya. *Madika: Jurnal Politik Dan Governance*, 3(1), 20–31. <https://doi.org/10.24239/madika.v3i1.1838>
- Sanjaya, R. C., Banafsah, Z. Z., Ziana Zein, B., Sunnah, I. A., & Istiqomah. (2025). Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) dalam Pemenuhan Hak Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Kabupaten Cirebon. *Jurnal Intervensi Sosial*, 3(2), 17–29. <https://doi.org/10.32734/intervensisosial.v3i2.18888>
- Ummairoh, E., Azhariyah, A., & Triwusudaningsih, E. (2023). Sejarah Pengertian Psikologi Perkembangan dan Teori Perkembangan Anak. *BAHTSUNA: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 5(2), 91–99. <https://doi.org/10.55210/bahtsuna.v5i2.296>

- Wadjo, H. Z., Leasa, E. Z., Latumaerissa, D., & Saimima, J. M. (2020). Penyelesaian Perkara Anak Sebagai Pelaku dan Korban Ditinjau Dari Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak. *SASI*, 26(2), 201. <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i2.306>
- Wahab, F., Darmawat, & Lahalling, H. (2023). Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Berhadapan dengan Hukum dalam Proses Asimilasi; Studi Literatur Review. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 2(3), 256–266. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i3.2048>
- Wiarso, G. (2022). *Memahami Pribadi Remaja*. Guepedia Group.